

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi patut untuk ditinjau ulang keberadaannya. Ini dimaksud agar tidak memunculkan multitafsir yang ujungnya menimbulkan kegaduhan, dan bahkan kekacauan hukum dalam penerapannya. Sebagaimana isi pasal-pasal ataupun ayat-ayat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak mengedepankan kepastian hukum, keadilan hukum ataupun kepatuhan hukum. Tujuan penelitian adalah Menganalisis pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan saat ini yang belum berkeadilan; menganalisis kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan saat ini; dan merekonstruksi hukum pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan yang berbasis nilai keadilan.

Dalam Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil temuan penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan saat ini masih belum berkeadilan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ternyata banyak ditemukan berbagai masalah terkait isi dan makna dari pasal-pasal yang multitafsir, bahkan terlihat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu atau ada kepentingan menguntungkan pihak lain. Secara substansi hukum terdapat kelemahan regulasi yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi pada khususnya kontrak jasa konstruksi. Fakta yang terjadi dalam pengaturan di beberapa Pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah memunculkan multitafsir yang ujungnya menimbulkan kegaduhan, dan bahkan kekacauan hukum dalam penerapannya. Pasal-pasal ataupun ayat-ayat pada undang-undang tersebut tidak mengedepankan kepastian hukum, keadilan hukum ataupun kepatuhan hukum. Terdapat kelemahan struktur hukum dan kerancuan dalam proses pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan, karena pengaturan tersebut sangat normatif sekali sehingga kontrak kerja Konstruksi di Pemerintahan dalam prosesnya juga berjalan secara normatif. Padahal dalam kontrak kerja Konstruksi di Pemerintahan seharusnya kondisional, situasional dan berorientasi produk atau hasil akhir yang mana harus sesuai dengan **standar hasil produk kerja**.

Rekonstruksi perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan yang berbasis nilai keadilan, bahwa Prosedur kontrak kerja konstruksi di Pemerintahan tidak dimaknai secara normatif, akan tetapi lebih berorientasi pada produk atau hasil akhir yang mana harus sesuai dengan **standar hasil produk kerja**. Konsep idealnya bahwa nilai pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi di pemerintahan yang berbasis nilai keadilan adalah perlindungan hukum yang adil antara kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi.

Kata Kunci: *Kontrak Kerja, Konstruksi Di Pemerintahan, Keadilan.*

ABSTRACT

Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services deserves to be reviewed. This is intended so as not to cause multiple interpretations that ultimately cause noise, and even legal chaos in its application. As the contents of the articles or verses in Law Number 2 of 2017 does not prioritize legal certainty, legal justice or legal compliance. The research objectives are to analyze the implementation of construction work contract agreements in the current government that are not yet just; analyze weaknesses that occur in the implementation of construction work contract agreements in the current government; and reconstructing the law for the implementation of construction work contract agreements in government based on the value of justice.

In this study using the constructivism paradigm, while the method of approach uses a socio-legal research approach. Sources of data in this study consisted of primary data sources and secondary data sources, consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Regarding data analysis, qualitative descriptive analysis was conducted.

Research findings show that the implementation of construction work contract agreements in the current government is still not fair. After the enactment of Law Number 2 of 2017, apparently there are many problems related to the content and meaning of the articles that have multiple interpretations, even appear discriminatory against certain groups of people or there are interests in the benefit of other parties. In substance, there are legal weaknesses related to the regulation of the implementation of construction services in particular construction service contracts. The facts that occur in the regulations in several Articles and / or paragraphs in Law Number 2 of 2017 have led to multiple interpretations which ultimately lead to noise, and even legal chaos in its application. Articles or paragraphs in the law do not prioritize legal certainty, legal justice or legal compliance. There are weaknesses in the legal structure and ambiguity in the process of implementing construction work contracts in government, because these arrangements are so normative that construction contracts in Government in the process are also normative. Whereas in a construction work contract in Government it should be conditional, situational and product-oriented or the end result must be in accordance with the standards of the work product.

Reconstruction of a construction work contract in a government based on fairness values, that the procedure for a construction work contract in the Government is not interpreted normatively, but is more oriented to the product or end result which must be in accordance with the standards of the work product. The ideal concept is that the value of implementing a construction work contract in a fair value-based government is a fair legal protection between equality between the Service Provider and the Construction Services User.

Keyword: Employment Contracts, Construction in Government, Justice.